

# BAB I

## PENDAHULUAN

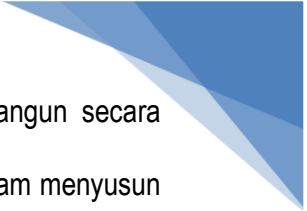
### 1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.




Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan *stakeholder* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai *stakeholder* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020.

Gubernur terpilih H. M. ALI BAAL MASDAR dan Hj. ENNY ANGGRAENY sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode Tahun 2017-2022 ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53/P Tahun 2017 Tanggal 10 Mei 2017 dan dilantik oleh Presiden pada tanggal 12 Mei 2017. Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari visi-misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Renja 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2019 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Barat pada khususnya dan Nasional pada umumnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
- l. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, terkait dengan Program Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan *Millennium Development Goals (MDGs)* ;

- 
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahap Perencanaan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  - o. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - p. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
  - q. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
  - r. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025 ;
  - s. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 ;
  - t. Peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
  - u. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
  - v. Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 2020 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018, dan memuat perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 serta untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) 2020 ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2020.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan T.A 2020 adalah sebagai berikut :

- BAB I :       Pendahuluan
  - A.       Latar Belakang
  - B.       Landasan Hukum
  - C.       Maksud dan Tujuan
  - D.       Sistematika Penulisan
  
- BAB II :       Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018
  
- BAB III :       Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
  
- BAB VI:       Penutup
  
- ^LAMPIRAN

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program / kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan, perubahan pada keluaran hasil maupun dampak. Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip good governance dengan pilar akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandate suatu instansi dalam pelayanan public yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah tercapai.

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses di mana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan akusisi yang dilakukan, berdasarkan apa yang diperjanjikan sebelumnya di dalam Perjanjian Kinerja (perkin).

Tujuan Pengukuran kinerja ini adalah :

1. Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan;
2. Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan kepada indikator inputs saja, tetapi yang lebih penting adalah indikator *outputs*, *outcomes*, *benefits*, dan *impacts*;
3. Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diterapkan.

Pengukuran atas pencapaian sasaran dengan menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

#### Rumus 1

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus sebagai berikut

Realisasi :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{-----}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

rencana tingkat capaian

## Rumus 2

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, rumus sebagai berikut :

Rencana – (Realisasi - Rencana)

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, mengikuti modul Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

Kategori Pencapaian Kinerja

o.	Rentang Capaian Kinerja	Interpretasi/Kategori Capaian Kinerja
.	>85-100	Memuaskan
.	>75 – 85	Sangat Baik
.	>65 – 75	Baik
.	>50 – 65	Cukup Baik
.	>30 – 50	Agak kurang
.	0 – 30	Kurang

### **B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018**

Penyusunan indicator kinerja utama (IKU) sesuai dengan peraturan Mempan dan RB Nomor : PER/09/M.Pan/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indicator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah harus selasar antara tingkat unit organisasi meliputi indicator keluaran (output) dan hasil (outcome).

Tujuan dalam penetapan IKU adalah : (1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajeme kinerja secara baik. (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akutanbilas kinerja. Pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur

dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja OPD pada dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Analisa Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

**Tabel 2.2**

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2018

o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	Angka Harapan Hidup	65 .59 %	0	0	PS Belum Rilis Data AHH Tahun 2018
		Persentase Balita Gizi Buruk	21 .03 %	18, 01%	1 14,4%	
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi	12	24	2 00%	
		Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup	42	68	3 8,1%	
		Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi	33 7	30 6	1 09,0%	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang	73 .01%	69, 70%	9 5%	



		ditangani				
		Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%	83 .33%	87, 00%	1 04%	
		Prevalensi HIV	<1	<1	1 00,0	
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90 %	75 %	8 3%	
0		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	10 0%	10 0%	1 00%	
1		Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	10 0%	10 0%	1 00%	
2		Persentase Penggunaan Obat Rasional	65 %	83, 30%	1 28%	
3		Rasio dokter per satuan penduduk	0. 32%	0,1 6%	5 0%	
4		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0, 32%	0,3 2%	1 00%	
5		Jumlah Desa/Kel yang	50	11 2	2 24%	

		stop BABS				
	6	Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	70 %	70 %	1 00%	
	7	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	33 %	33 %	1 00%	

Dari table diatas terlihat bahwa tahun 2018, dari 17 indikator kinerja utama (IKU) dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 4 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun ada beberapa indikator yang memiliki data pembandingan tahun 2017 akan tetapi secara umum belum dapat dijadikan capaian data pembandingan indikator kinerja karena Lakip Tahun 2017 masih menggunakan indikator berdasarkan Renstra 2011- 2016 sedangkan Renstra 2017 – 2022 diterapkan awal tahun anggaran 2018, sedangkan capaian indikator kinerja angka harapan hidup masih belum terisi karena badan pusat statistic (BPS) provinsi Sulawesi barat belum merilis untuk tahun 2018 . IKU yang pencapaiannya dibawah target, yaitu :

- 1) Persentase capaian kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup yaitu 38,1%, artinya adanya peningkatan angka kematian dari target 42 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan capaian angka kematian 68 per 100.000,-- kelahiran hidup.
- 2) Persentase capaian Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani yaitu 95% , dari target 73,01 % dengan capaian 69,70%.
- 3) Persentase capaian cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yaitu 83% dari target 90% dengan capaian 75%
- 4) Persentase capaian rasio dokter pe satuan penduduk yaitu 50%, dari target 0,32% dengan capaian 0,16%.

Sedangkan berdasarkan nilai realisasi pencapaian kinerja dari 17 indikator kinerja utama (IKU), nilai capainnya tergolong dalam kriteriia "*Berhasil / Tercapai* ( Interval nilai pencapaian 81 – 100 )

## 2. Analisa Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya.

Jlka dibandingkan dengan capaian kinerja periode sebelumnya ( tahun 2016 dan 2017) hanya 2 indikator yang mempunyai kesamaan dengan uraian indikator kinerja , dimana tahun sebelumnya ( 2016 dan 2017) berdasarkan renstra 2012 – 2016 sedangkan indicator kinerja 2018 berdasarkan renstra 2017 – 2022. Dari 2 indikator yang capaiannya ada mengalami penurunan maupun peningkatan yaitu :

- 1) Persentase capaian Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dengan selisih penurunan sebesar 12% .
- 2) Persentase capaian cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dengan peningkatan capaian sebesar 4%

Hal tersebut dapat dilihat table 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan  
Tahun 2016 - 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian			Ket
			Renstra ( 2012 - 2016)		Renstra ( 2017 - 2022 )	
			2016	2017	2018	
	Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	Angka Harapan Hidup	-	-	0	BPS Belum Rilis Data AHH Tahun 2018
		Persentase Balita Gizi Buruk	-	-	114,4 %	
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi	-	-	200%	
		Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup	-	-	38,1%	
		Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi	-	-	109,0 %	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	102,60%	107,00%	95%	

		Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%	-	-	104%	
		Prevalensi HIV	-	-	100,0	
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	79,8%	79,8%	83%	
0		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	-	-	100%	
1		Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	-	-	100%	
2		Persentase Penggunaan Obat Rasional	-	-	128%	
3		Rasio dokter per satuan penduduk	-	-	50%	
4		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	-	-	100%	
5		Jumlah Desa/Kel yang stop BABS	-	-	224%	
6		Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	-	-	100%	
7		Persentase Kabupaten / Kota yang	-	-	100%	

			memiliki Kebijakan PHBS				
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

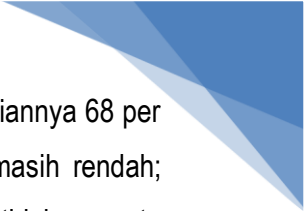
3. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dari 17 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan provinsi Sulawesi barat pada tahun 2018. Pencapaian target capaian dan persentase dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.4** Persentase capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian			Interval Realisasi Kinerja				Ket
		Target	Realisasi	Capaian %	81 - 100	61 - 80	41 - 60	≤ 40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka Harapan Hidup	65.59 %	0	0					BPS Belum Rilis Data AHH Tahun 2018
2	Persentase Balita Gizi Buruk	21.03 %	18,01%	114,4%	V	-	-	-	
3	Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi	12	24	200%	V	-	-	-	
4	Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup	42	68	38,1%	-	-	-	V	
5	Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi	337	306	109,0%	V	-	-	-	
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	73.01%	69,70%	95%	V	-	-	-	
7	Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%	83.33%	87,00%	104%	V	-	-	-	
8	Prevalensi HIV	<1	<1	100,0	V	-	-	-	
9	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90%	75%	83%	V	-	-	-	
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	V	-	-	-	
11	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	V	-	-	-	
12	Persentase Penggunaan Obat Rasional	65%	83,30%	128%	V	-	-	-	
13	Rasio dokter per satuan penduduk	0.32%	0,16%	50%	-	-	V	-	
14	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,32%	0,32%	100%	V	-	-	-	
15	Jumlah Desa/Kel yang stop BABS	50	112	224%	V	-	-	-	
16	Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	70%	70%	100%	V	-	-	-	
17	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	33%	33%	100%	V	-	-	-	

Sampai saat ini angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang terjadi masih perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama angka kematian ibu yang tidak mencapai target tahun 2018 dimana Persentase capaian kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup yaitu 38,1%, artinya adanya



peningkatan angka kematian dari target 42 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan capaiannya 68 per 100.000,-- kelahiran hidup. ini sebabkan status kesehatan ibu dan calon ibu yang masih rendah; meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, jumlah dan penyebaran dokter tidak merata rumah sakit memiliki dokter spesialis kebidanan dan kandungan; belum optimalnya pendayagunaan tenaga medis lain (spesialis anestesi, penyakit dalam, anak) yang ada di rumah sakit dalam penanganan kasus kegawatdaruratan obstetrik. Sedangkan rasio kebutuhan dokter tidak mencapai target disebabkan tugas pokok opd dinas kesehatan hanya sebagai fasilitasi kabupaten dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan akan tetapi ada beberapa progam kementerian kesehatan yaitu nusantara sehat yang mendukung program kinerja dalam mencapai distribusi kebutuhan rasio dokter khusus daerah yang terpencil.

Beberapa penyebab dari permasalahan tersebut diatas antara lain :

- 1) Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program belum semuanya bersinergi.
- 2) Perencanaan anggaran program dan kegiatan belum berbasis capaian indicator kinerja tahun anggaran.
- 3) Keterbatasan anggaran dalam mencapai indicator kinerja
- 4) Kesiambungan program antara bidang maupun program yang ada di dinas kabupaten belum optimal. Beberapa penyebab dari keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas antara lain
  - 1) Adanya dukungan anggaran dan program peningkatan kapasitas pengelola program dari kementerian kesehatan.
  - 2) Anggaran DAK yang langsung ke kabupaten sesuai petunjuk teknis sehingga capaian terealisasi terutama program akreditasi puskesmas.
  - 3) Adanya anggaran APBN dan program kementerian kesehatan yang mendukung capaian kinerja OPD Dinas Kesehatan.

Solusi yang akan dilakukan pada berikutnya antara lain :

- 1) Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan harus lebih ditingkatkan dana diperbaiki antara pengelola program baik OPD dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten.
- 2) Penyusunan program dan kegiatan yang lebih sensitive, aplikatif, tepat, jelas outcam dan memiliki daya ungkit yang signifikan serta bersinergi antara program / kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.

#### 4. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya.

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan alokasi anggaran pada dinas kesehatan jika dibandingkan dengan periode tahun anggaran sebelumnya. Anggaran kesehatan jika dibandingkan dengan total berjumlah 100 % di luar belanja tidak langsung karena bantuan iuran premi program jaminan kesehatan masuk dalam anggaran OPD dinas kesehatan. Berikut ini jumlah anggaran tahun 2014 hingga 2018 yang dialokasikan pada dinas kesehatan.



**Tabel 2.5**

Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Barat 2014 - 2018

No	Tahun	Pagu Anggaran
1	2014	30.915.782.000
2	2015	24.425.072.544
3	2016	12.953.526.200
4	2017	11.395.000.000
5	2018	30.103.133.122

Agar dapat mewujudkan target capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, tentunya dibutuhkan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang upaya pencapaian target sasaran strategis. disampaikan anggaran yang telah dialokasikan pada dinas kesehatan tahun 2018.

**Tabel 2.6**

Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja pada Dinas  
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Anggaran	
				Alokasi (Rp)	%
1	Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	Angka Harapan Hidup	0	-	
		Persentase Balita Gizi Buruk	1.199.440.000	3,98	
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi	0	-	
		Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup	515.729.000	1,71	
		Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup /	0	-	

	Angka kematian bayi		
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	0	-
	Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%	152.195.000	0,64
	Prevalensi HIV	100.000.000	0,42
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	203.150.000	0,67
0	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0	-
1	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0	-
2	Persentase Penggunaan Obat Rasional	243.172.000	1,02
3	Rasio dokter per satuan penduduk	0	-
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0	-
5	Jumlah Desa/Kel yang stop BABS	205.750.000	0,68



		6	Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	0	21.112.038.00	70,13
		7	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	0		-
Alokasi Anggaran Untuk Mencapai Target Sasaran IKU					23.731.474.000	78,83
Total Anggaran Belanja Langsung					30.103.133.122	100,00

Pada tahun 2018, alokasi anggaran belanja langsung pada dinas kesehatan provinsi Sulawesi barat sebesar Rp. 30.103.133.122. sebesar 78,33 % atau Rp. 23.731.474.000 digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan renstra. Indikator pendukung selain IKU ( Indikator Kinerja Utama) sebesar 21,66 % atau Rp. 6.371.659.122 digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan capaian target IKU, antara lain :


No.	Uraian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
10	Program Kebijakan dan Management Pembangunan

	kesehatan
11	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
12	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
13	Program Pelayanan Kesehatan Perorangan

### C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah pembangunan kesehatan masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan anggaran yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD). Laporan Alokasi dan realisasi anggaran kegiatan tahun 2018 pada dinas kesehatan provinsi Sulawesi barat, dilihat table berikut ini :

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS KESEHATAN				
TAHUN ANGGARAN 2018				
No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.608.728.000	1.407.439.525	87.49
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	580.926.050	538.359.217	92.67
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	120.350.000	97.030.000	80.62
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92.000.000	51.236.400	55.69
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	175.240.000	161.302.800	92.05
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	553.304.453	295.842.653	53.47
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	90.000.000	86.080.200	95.64
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	690.270.000	644.091.000	93.31
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.199.440.000	966.232.850	80.56
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	500.500.000	405.799.800	81.08
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	665.565.000	538.887.400	80.97
12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.414.667.599	1.113.782.073	78.73
13	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	515.729.000	415.057.800	80.48
14	Program Kebijakan dan Management Pembangunan kesehatan	285.614.020	230.355.000	80.65
15	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	314.521.000	312.580.500	99.38
16	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	110.120.000	66.490.000	60.38
17	Program Pelayanan Kesehatan Perorangan	21.186.158.000	21.102.626.800	99.61



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**A. Tujuan dan Sasaran**

**1. Tujuan**


Dalam upaya mencapai visi “Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Barat yang Maju dan Mala’biq” dan salah satu misi 1 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

**2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran adalah Meningkatnya derajat kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi dengan indikator sasaran sebagai berikut :
  1. Angka Harapan Hidup
  2. Persentase Balita Gizi Buruk
- b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan, dengan indicator sasaran sebagai berikut :
  1. Angka Kematian Ibu
  2. Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak
  3. Regionalisasi Rujukan
  4. Jumlah RSUD yang terakreditasi
  5. Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi
  6. Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup
  7. Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi
  8. Angka kelangsungan hidup bayi
  9. Angka kematian balita
  10. Angka kematian neonatal
  11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

- 
12. Cakupan pelayanan anak balita
  13. Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
  14. Persentase Anak Baduta dengan stunting
  15. Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > \*80%
  16. Prevalensi HIV
  17. Jumlah Kabupaten / Kota dengan eliminasi malaria
  18. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
  19. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
  20. Cakupan balita pneumonia yang ditangani
  21. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
  22. Penderita diare yang ditangani
  23. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
  24. Persentase Penggunaan Obat Rasional
  25. Pengawasan obat dan makanan
  26. Rasio dokter per satuan penduduk
  27. Rasio tenaga medis per satuan penduduk
  28. Persentase pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang terlatih
  29. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA
  30. Jumlah Institusi yang mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
  31. Jumlah Desa/Kel yang stop BABS
  32. Jumlah Sarana Air Minum (SAM) yang memenuhi syarat kesehatan
  33. Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan
  34. Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
  35. Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
  36. Jumlah Dokumen kebijakan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pembangunan kesehatan yang Berkualitas
  37. Jumlah desa yang difasilitasi Gerakan Sulbar Marasa
  38. Jumlah Provinsi dan kabupaten/kota Menyusun Profil Kesehatan
  39. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
  40. Jumlah kunjungan Rawat Jalan di UPTD Balai kesehatan
  41. Jumlah Orang yang di donor
  42. Jumlah Pemeriksaan sampel/sediaan di Labkesda

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

**Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan Kualitas SDM Yang terdidik, Sehat dan Berbudaya	1	Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	Angka Harapan Hidup	64.75	65.59	66.33	66.97	67.55	67.55
				Persentase Balita Gizi Buruk	23.23	21.03	18.83	16.63	14.43	12.23
		2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak	0	0	1	0	1	0
				Regionalisasi Rujukan	0	0	1	0	1	0
				Jumlah RSUD yang terakreditasi	2	1	1	1	1	1
				Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi	1	12	10	10	10	10
				Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiranhidup	47	42	37	32	27	22
				Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi	379	337	316	257	198	148
				Angka kelangsungan hidup bayi	985	992	993	994	995	997
				Angka kematian balita	10	10	9	8	7	7

			Angka kematian neonatal	11	11	11	11	10	10
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	71.83	73.01	76.02	79.03	82.04	85.05
			Cakupan pelayanan anak balita	81.5	84.72	86.94	89.2	92.4	95
			Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI	75	60	65	70	75	80
			Persentase Anak Baduta dengan stunting	28.2	27.2	26.2	25.2	24.2	23.2
			Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%	16.67	83.33	100	100	100	100
			Prevalensi HIV	0.2	<1	<1	<1	<1	<1
			Jumlah Kabupaten / Kota dengan eliminasi malaria	2	3	4	6	6	6
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	77.5	90	92	94	96	98
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	86.41	88.16	89.91	91.66	93.42	95.17
			Cakupan balita pneumonia yang ditangani	13.22	13.48	13.74	14	14.25	14.51
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
			Penderita diare yang ditangani	65.1	88.71	100	100	100	100
			Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penggunaan Obat Rasional	60	65	70	75	80	85

			Pengawasan obat dan makanan	50	50	50	50	50	50
			Rasio dokter per satuan penduduk	0.23	0.32	0.35	0.37	0.39	0.41
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.28	0.32	0.35	0.37	0.39	0.41
			Persentase pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang terlatih	60	75	80	85	90	95
			Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	10	10	10	10	10
			Jumlah Institusi yang mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	100	50	50	50	50	50
			Jumlah Desa/Kel yang stop BABS	100	50	50	50	50	50
			Jumlah Sarana Air Minum (SAM) yang memenuhi syarat kesehatan	57581	8000	10000	10000	10000	10000
			Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan	556	100	100	100	100	100
			Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	62.27	70	75	80	85	90
			Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	17	33	67	83	100	100
			Jumlah Dokumen kebijakan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pembangunan kesehatan yang Berkualitas	14	1	1	1	1	1

		Jumlah desa yang difasilitasi Gerakan Sulbar Marasa	0	6	6	6	6	6
		Jumlah Provinsi dan kabupaten/kota Menyusun Profil Kesehatan	7	7	7	7	7	7
		Persentase Kabupaten/ Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas	66.67	83.33	100	100	100	100
		Jumlah kunjungan Rawat Jalan di UPTD Balai kesehatan	7292	8450	8700	900	9300	9600
		Jumlah Orang yang di donor	0	30	80	120	160	200
		Jumlah Pemeriksaan sampel/sediaan di Labkesda	0	50	100	300	500	500



## **B. Program dan Kegiatan**

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman
- ✓ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- ✓ Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak
- ✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
- ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Penyediaan Jasa Pendukung / Tenaga Administrasi
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik

### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- ✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
- ✓ Pemeliharaan Rutin / berkala sarana dan prasarana Laboratorium
- ✓ Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- ✓ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- ✓ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan/Penerangan Bangunan Kantor

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**


- ✓ Pengadaan mesin / Kartu absensi
- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- ✓ Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- ✓ Workshop Penyusunan ABK
- ✓ Pendidikan dan Pelatihan Formal
- ✓ Bimbingan Teknik Penyusunan Standar Operasional Bidang Kesehatan
- ✓ Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan

### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- ✓ Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan Bendahara
- ✓ Penyusunan Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan
- ✓ Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD
- ✓ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- ✓ Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD

- 
- ✓ Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan
  - ✓ Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )
  - ✓ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - ✓ Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan
  - ✓ Rapat Teknis Evaluasi Triwulan Kinerja Pemerintahan Di Bidang Kesehatan


## **6. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit**

### **jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**

- ✓ Pengadaan Rumah Sakit Keliling
- ✓ Pembangunan Rumah Sakit ibu dan Anak
- ✓ Pengadaan Sistem Informasi Rujukan
- ✓ Workshop Sistem Informasi Rujukan
- ✓ Pertemuan Sister Hospital Dalam Pemenuhan Tenaga Spesialistik di Rumah Sakit
- ✓ Workshop Penguatan SPGT
- ✓ Pelatihan Petugas Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)
- ✓ Visitasi rumah sakit rujukan
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Rujukan
- ✓ Pelaksanaan Jejaring Telemedicine
- ✓ Workshop Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai sistem Rujukan SPA di Fasyankes
- ✓ Workshop Penguatan Pengampuan Rumah Sakit dan Puskesmas
- ✓ Validasi Data ASPAK RS
- ✓ Workshop Pengelolaan Peralatan Medis dalam Rangka Pemenuhan Standar dan Akreditasi RS
- ✓ Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan kebutuhan SPA RS
- ✓ Pertemuan teknis Pengelolaan SPA dalam Rangka Pemenuhan Standar dan Akreditasi RS
- ✓ Monev ASPAK di RS
- ✓ Monev Pengelolaan SPA di RS
- ✓ Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai Sistem Rujukan SPA di Fasyankes
- ✓ Penguatan LP/LS RMC
- ✓ Workshop Teknis RMC sebagai Sistem Rujukan SPA di Fasyankes
- ✓ Evaluasi pembentukan RMC di Kabupaten

## **7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**

- ✓ Monitoring evaluasi pasca survei akreditasi RS
- ✓ Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- ✓ Visitasi Akreditasi dan Kelas Rumah Sakit
- ✓ Workshop Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit
- ✓ Workshop Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA)
- ✓ Pembinaan BLUD Rumah Sakit

- 
- ✓ Workshop Pedoman Keselamatan Pasien
  - ✓ Workshop Akreditasi RS dan BLUD
  - ✓ Workshop Pembahasan Laporan insiden Keselamatan Pasien
  - ✓ Pelatihan Pemeriksaan Laboratorium infeksi nosokomial di Rumah Sakit
  - ✓ Pertemuan Manajemen Rumah Sakit untuk BLUD
  - ✓ Rapat Koordinasi dalam rangka kontrol internal Pencegahan Fraud di Rumah Sakit
  - ✓ Workshop Penyusunan Panduan Praktek Kedokteran Clinical Pathway di RS
  - ✓ Workshop Penguatan Pelayanan Darah bekerjasama Puskesmas, RS dan UTD dalam mendukung Quickwins
  - ✓ Monev implementasi Pelaksanaan Quickwins bekerjasama Puskesmas, RS dan UTD
  - ✓ Rapat Koordinasi LS/LP dalam rangka implementasi pelaksanaan Quickwins pelayanan darah
  - ✓ Pertemuan LS/LP Program pelayanan Kesehatan
  - ✓ Workshop Teknis penguatan pencatatan & pelaporan Puskesmas
  - ✓ Workshop Penguatan pembinaan puskesmas oleh Dinkes Provinsi & Dinkes Kabupaten
  - ✓ Workshop penguatan FKTP dalam mendukung keberhasilan implementasi JKN
  - ✓ Monev PIS-PK
  - ✓ Monev dalam rangka Bimtek peningkatan Mutu Yankes di Klinik Pratama
  - ✓ Penyelenggaraan Penilaian FKTP berprestasi dalam rangka Hari Kesehatan Nasional
  - ✓ Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Kesehatan dalam Program Quickwins
  - ✓ Sosialisasi/Advokasi dalam mendukung peningkatan pelayanan Kesehatan Primer
  - ✓ Peningkatan kemampuan Teknis pelayanan kesehatan Gigi & Mulut
  - ✓ Kegiatan tim pelayanan Kesehatan bergerak dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan & Kepulauan (DTPK)
  - ✓ Peningkatan Kemampuan Teknis penanggulangan penderita Gawat Darurat (PPGD)
  - ✓ Pembinaan Teknis PIS-PK
  - ✓ Peningkatan Kemampuan Teknis pendampingan Akreditasi FKTP
  - ✓ Workshop Teknis Akreditasi FKTP
  - ✓ Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi FKTP
  - ✓ Pertemuan LS/LP dalam rangka upaya peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi FKTP
  - ✓ Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan tradisional
  - ✓ Pelatihan tenaga kesehatan Tradisional
  - ✓ Penilaian TOGA
  - ✓ Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
  - ✓ Upaya Pengurangan risiko krisis kesehatan
  - ✓ Workshop Penguatan SPGDT
  - ✓ Penguatan sister Hospital dalam pemenuhan tenaga Spesialistik di Rumah Sakiit
  - ✓ Orientasi Kader POS Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Pada Kelompok Pekerja


- ✓ Pelatihan Dokter Puskesmas /RS Diagnosis Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK)
- ✓ Orientasi Kader POS Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Pada Kelompok Pekerja
- ✓ Workshop Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan bagi Pekerja

#### **8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**

- ✓ Peningkatan Kapasitas P4K ( Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi)
- ✓ Pendampingan Ibu Hamil Dalam Rangka Menurunkan Jumlah Kematian Ibu
- ✓ Pelatihan Asuhan Persalinan Normal
- ✓ Pelatihan Antenatal Care Terstandar
- ✓ Pendampingan Bayi Resiko Tinggi Dalam Rangka Menurunkan Jumlah Kematian Bayi
- ✓ Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Neonatal Esensial
- ✓ Orientasi TIM AMP ( Audt Maternal Perinatal )
- ✓ Screening Hipoterooid Kongenital Bayi Neonatus Dalam Mencegah Retardasi Mental Pada Bayi
- ✓ TOT Audit Maternal Perinatal
- ✓ Peningkatan Kapasitas Dalam Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak
- ✓ Orientasi MTBS Revisi
- ✓ Peningkatan kapasitas petugas dalam kegawatdaruratan maternal neonatal
- ✓ Monitoring Dan Evaluasi Program Kesehatan Keluarga
- ✓ Kolaborasi Lintas Program Dalam Peningkatan Kualitas Anc (Anc Terpadu)
- ✓ Evaluasi pelaksanaan Program perencanaan Persalinan dan Pencegahan komplikasi (P4K)
- ✓ Peningkatan Kapasitas nakes dalam Penurunan Kematian ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- ✓ Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pembacaan Skor Puji Rohati
- ✓ Pertemuan Koordinasi dalam Peningkatan Cakupan Program Pelayanan Bayi
- ✓ Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan tenaga pendidik dalam SDIDTK
- ✓ Pendampingan ibu Hamil dan bayi resiko tinggi
- ✓ Pertemuan Koordinasi Terkait Penggunaan Buku KIA
- ✓ Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan bayi
- ✓ Pemantauan Paska Pendampingan Ibu Hamil
- ✓ Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen Asfiksia dan BBLR
- ✓ Peningkatan Kapasitas Kesehatan Dalam Screening Bayi Baru Lahir
- ✓ Orientasi SDIDTK Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Tenaga Pendidik PAUD
- ✓ Peningkatan kapasitas kegawatdaruratan maternal dan neonatal

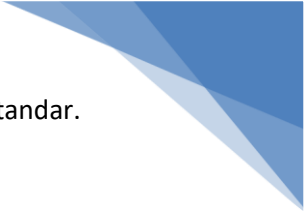
#### **9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**


- ✓ Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Konseling Menyusui
- ✓ Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi Ibu Dan Anak Berkelanjutan Melalui Penyelamatan 1000 Hpk

- 
- ✓ Konseling Pemberian Makanan Tambahan Pada Bayi Dan Anak
  - ✓ Penyusunan Perencanaan Partisipatif Dalam Mengurangi Dan Mencegah Stunting, Low Birth Weigh Dan Malnutrition
  - ✓ Pengadaan PMT ibu hamil KEK dan balita kurus
  - ✓ TOT Fasilitator PAGT (Pelayanan Asuhan Gizi Terpadu)
  - ✓ Suplemetasi Tablet Tambah Darah Bagi Remaja Puteri
  - ✓ Evaluasi Pemberian PMT pada Ibu Hamil dan Balita
  - ✓ Suplementasi Tablet Tambah Darah Bagi Ibu Hamil
  - ✓ Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Mapping Gizi Buruk Dan Gizi Kurang Dengan Menggunakan Aplikasi
  - ✓ Monitoring Dan Evaluasi Program Gizi Masyarakat
  - ✓ Pemutkhiran Data Dan Surveilans Gizi
  - ✓ Pendampingan Balita Gizi Buruk Dan Gizi Kurang
  - ✓ Refresh Konselor ASI dalam melakukan konseling Menyusui
  - ✓ Peningkatan kapasitas Petugas dalam Pemantauan Pertumbuhan

#### **10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

- ✓ Pencetakan Format Pencatatan dan Pelaporan TB
- ✓ Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium TB
- ✓ Expansi Strategi DOTS di Daerah Terpencil di Provinsi Sulawesi Barat
- ✓ Pelatihan Tenaga Pengelola Program TB dan Dokter di UPK
- ✓ Peningkatan Penemuan Penderita TB
- ✓ Peningkatan Pengetahuan Kader Pos TB Desa
- ✓ Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pos TB Desa
- ✓ Pertemuan Monitoring Evaluasi Program TB di Provinsi
- ✓ Peningkatan kapasitas pengelola Program HIV
- ✓ Peningkatan Kapasitas Pengelola Program dalam Aplikasi Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA)
- ✓ Peningkatan Konseling dan testing HIV bagi Populasi Kunci, Populasi Umum dan Populasi Khusus
- ✓ Penguatan Sistem Surveilans Malaria (e-Sismal)
- ✓ Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas Mikroskopis
- ✓ Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Malaria dalam Pelaksanaan Surveilans Migrasi dan Penyelidikan Epidemiologi
- ✓ Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium Malaria
- ✓ Pemetaan Vektor Malaria di Daerah Endemis
- ✓ Peningkatan Kemampuan Manajemen Dasar Malaria di Kabupaten
- ✓ Evaluasi Malaria di Kabupaten Eliminasi dan Pasca Eliminasi
- ✓ Evaluasi Pendistribusian dan Penggunaan Kelambu
- ✓ Pelacakan kasus balita pnemonia
- ✓ Bimtek program P2 ISPA

- 
- ✓ Peningkatan Kapasitas petugas Puskesmas dalam tatalaksana ISPA sesuai standar.
  - ✓ Pengadaan Media KIE
  - ✓ Pertemuan Evaluasi Program DBD/Arbovirosis
  - ✓ Peningkatan Pengetahuan Kader Jumantik DBD dan Arbovirois
  - ✓ Rapat Koordinasi Pengelola Penyakit DBD
  - ✓ Peningkatan Pengetahuan Petugas dalam penanggulangan KLB DBD
  - ✓ Pertemuan Lintas Sektor dalam Penanggulangan DBD
  - ✓ Sosialisasi dan Advokasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik
  - ✓ Monitoring Pengendalian Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue)
  - ✓ Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (Pengendalian DBD)
  - ✓ Pertemuan Evaluasi Penanganan Diare
  - ✓ Rapat Koordinasi Pengelola Penyakit Diare
  - ✓ Peningkatan Pengetahuan Petugas dalam penanggulangan KLB Diare
  - ✓ Monitoring dan Evaluasi Program Diare
  - ✓ Kegiatan Advokasi Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
  - ✓ Review cakupan dan evaluasi program imunisasi
  - ✓ Kegiatan Bimtek Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap
  - ✓ Monitoring desa UCI dalam rangka pelaksanaan DOFU
  - ✓ Distribusi Vaksin dan Logistik Program Imunisasi
  - ✓ Monitoring dan pengumpulan data pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
  - ✓ Pelatihan Surveillance PD3I ( Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi)
  - ✓ Sweeping Pemberiaan Imunisasi Campak
  - ✓ Monitoring dan Evaluasi Pemberiaan Imunisasi Campak dan PD31
  - ✓ Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi Program Penyakit Infeksi Emerging (PIE)
  - ✓ Investigasi dan Penanggulangan KLB
  - ✓ Pertemuan evaluasi STP Rutin dan KLB
  - ✓ Pertemuan evaluasi SKDR
  - ✓ Fasilitasi Cold Room
  - ✓ Pelacakan kasus AFP
  - ✓ Bimtek Program Surveilans Terpadu
  - ✓ Verifikasi alert/sinyal Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)
  - ✓ Logistik kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
  - ✓ Peningkatan kapasitas petugas surveilans kabupaten
  - ✓ Monitoring pelaksanaan Introduksi Vaksin Measles rubella (MR)
  - ✓ Pertemuan evaluasi surveilans PD3I
  - ✓ Kampanye / Sosialisasi Program Penanggulangan TBC pada HTBS
  - ✓ Pertemuan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program TBC
  - ✓ Pelatihan konseling dan Testing bagi petugas fasilitas layanan kesehatan
  - ✓ Bimbingan teknis tatalaksana perawatan IMS
  - ✓ Sosialisasi dan penyuluhan HIV

- 
- ✓ Sosialisasi Pemetaan
  - ✓ Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1 - 2 - 5
  - ✓ Peningkatan Penemuan dan Screening Ibu Hamil
  - ✓ Workshop sistem pencatatan dan pelaporan penegana kasus diare
  - ✓ Peningkatan Pengetahuan Petugas dalam penanggulangan KLB Diare
  - ✓ Bimtek P2 Diare
  - ✓ Pertemuan Evaluasi Program Imunisasi
  - ✓ Monitoring Pelaksanaan DOPU (drop Out Follow Up) program imunisasi
  - ✓ Bimbingan Teknis Pelaksanaan Imunisasi Lanjutan anak usia 12-36 Bulan
  - ✓ Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah
  - ✓ Pelacakan kasus AFP, Campak dan Kasus PD3I Lainnya
  - ✓ Pelatihan Surveillance PD3I ( Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi)
  - ✓ Pengiriman spesimen kasus PD3I dan KLB ke Laboratorium
  - ✓ Sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan kesehatan dan Pembuatan Rencana Kontinjensi
  - ✓ Pelaksanaan Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta & Frambusia
  - ✓ Survey Kusta pada anak Sekolah
  - ✓ Pemberian Kemoprofilaksis Kusta
  - ✓ Orientasi Petugas Kusta

#### **11. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan**

- ✓ Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat
- ✓ Pemusnahan Obat
- ✓ Pembekalan Tehnik Tenaga Kesehatan ( Apoteker ) di Rumah Sakit Tentang Pelayanan Informasi Obat (PIO), Konseling dan MESO)
- ✓ Pemantauan Indikator Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
- ✓ Pertemuan Manajemen Logistik Obat di Instalasi Farmasi
- ✓ Pemantauan Indikator Penggunaan Obat Rasional ( Ispa Non Pneumonia, Diare Non Spesifik, Myalgia )
- ✓ Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- ✓ Monitoring Evaluasi Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Kefarmasian
- ✓ Pemantauan Kesesuaian Obat di RSUD
- ✓ Distribusi Obat
- ✓ Penyediaan Data Stock Obat berbasis IT di Instalasi Farmasi Provinsi
- ✓ Pemantauan Instalasi Farmasi yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat sesuai Standar
- ✓ Sosialisasi e\_Monev Katalog Obat dalam mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan
- ✓ Pemantauan Pelayanan Farmasi Komunitas dan Klinik di Rumah sakit
- ✓ Harmonisasi dan Integarasi serta Implementasi Pelayanan Obat Satu Pintu (One Gate Policy)

- ✓ Penyediaan Data Stock Opname Obat Buffer Stock
- ✓ Pertemuan dan Evaluasi Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian
- ✓ Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) Pada Stakeholder
- ✓ Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- ✓ Penyediaan Operasional di IFP
- ✓ Pertemuan Pelayanan kefarmasian Untuk Terapi Antibiotik
- ✓ Pengadaan Sistem Aplikasi Barcode Perhitungan Stok Opname Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
- ✓ Pemutakhiran data Kefarmasian dan Alkes
- ✓ Pelayanan Kefarmasian
- ✓ Pemantauan Kesesuaian Obat untuk Faskes Tingkat I di Kab/Kota terhadap Formularium Nasional
- ✓ Pengadaan Sarana Penunjang Instalasi Farmasi
- ✓ Implementasi E-Logistik dalam mendukung pengelolaan obat satu pintu di Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota

## **12. Program Pengawasan Obat dan Makanan**

- ✓ Peningkatan Pembinaan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
- ✓ Sosialisasi BTP
- ✓ Pertemuan Tenaga Kesehatan dan Pengusaha IRT-P
- ✓ Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Program PPDS/PPDGS dan Tugas Belajar
- ✓ Sosialisasi Penyelenggaraan Program PPDS/PPDGS dan Tugas Belajar
- ✓ Pendampingan Wajib Kerja Sarjana (WKS) bagi Lulusan Pendidikan Dokter Spesialis
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI)
- ✓ Pertemuan Koordinasi Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI)
- ✓ Pertemuan Evaluasi Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI)
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Penugasan Tenaga Kesehatan secara Team Based dan secara individu (Nusantara Sehat)
- ✓ Pertemuan Evaluasi Penugasan Tenaga Kesehatan secara Team Based dan secara individu (Nusantara Sehat)
- ✓ Pemutakhiran Data SDM Kesehatan
- ✓ Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Bidang SDM Kesehatan
- ✓ Workshop Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi
- ✓ Pertemuan Pendataan STR Tenaga Kesehatan
- ✓ Pertemuan MTKP, Organisasi Profesi dan Institusi Pendidikan Kesehatan
- ✓ Pengadaan peralatan dan perlengkapan pelayanan STR On Sitetenaga kesehatan
- ✓ Pertemuan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan TK. Provinsi
- ✓ Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan




- ✓ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Usulan Penerbitan STR
- ✓ Sosialisasi pedoman evaluasi kemampuan bagi tenaga kesehatan yang belum memenuhi syarat perolehan satuan kredit profesi (SKP) untuk re-registrasi
- ✓ Penilaian Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas
- ✓ Pelatihan Teknis Kesehatan (Manajemen, Upaya, Profesi, Penunjang Jabatan Fungsional dan Substansi Promosi Kesehatan)
- ✓ Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
- ✓ Penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan
- ✓ Fasilitasi Visitasi Rumah Sakit Penempatan Dokter Spesialis
- ✓ Evaluasi Program Percepatan Pendidikan SDM Kesehatan

### **13. Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

- ✓ Pelatihan pemberdayaan orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan Napza
- ✓ Pelatihan Skrining NAPZA dengan menggunakan Assist
- ✓ Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan di PKM
- ✓ Pelatihan Deteksi dini Keswa dan Napza melalui layanan keswa bergerak
- ✓ Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Dimensia
- ✓ Pembentukan Satgas gangguan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)
- ✓ Pengadaan Bahan Pakai Habis : Rapid Test Napza
- ✓ Advokasi dan sosialisasi road map pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan napza
- ✓ Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Jiwa
- ✓ Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dan Sekolah dalam Upaya Berhenti Merokok ( UBM )
- ✓ Observasi Implementasi KTR di Sekolah dan SKPD di Provinsi Sulawesi Barat
- ✓ Skrining dan Konseling UBM di Sekolah
- ✓ Sosialisasi dan Advokasi Perda KTR
- ✓ Rapat Koordinasi LS/LP dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok
- ✓ Pembentukan Satgas KTR
- ✓ Workshop Tim Satgas KTR
- ✓ Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan orang tua dalam penyalahgunaan NAPZA
- ✓ Pelatihan Keterampilan dan Kecakapan hidup (life skill) Kesehatan Jiwa bagi Anak Remaja
- ✓ Pertemuan Koordinasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) TK. Provinsi
- ✓ Bimbingan Teknis Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Kabupaten / Puskesmas / POS UKK
- ✓ Pengukuran Kebugaran Jaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemprov Sulbar

### **14. Program pengembangan Lingkungan Sehat**

- ✓ Pemicuan Jamban Sehat (PJS) dalam Rangka Sulbar Marasa


- 
- ✓ Pertemuan Jejaring STBM
  - ✓ Orientasi STBM stunting Kepada Stakeholder dan Tokoh Masyarakat
  - ✓ Penyediaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi
  - ✓ Monev Pasca PJS (Pemicuan Jamban Sehat)
  - ✓ Pelatihan Wirausaha Sanitasi
  - ✓ Penyediaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Air Minum
  - ✓ Pelatihan Surveilans Kualitas air Minum
  - ✓ Pelatihan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih (Inspeksi Kesehatan Lingkungan)
  - ✓ Orientasi dan Implementasi Pasar Sehat
  - ✓ Orientasi Petugas dalam Peningkatan Mutu Pengawasan terhadap TPM
  - ✓ Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes
  - ✓ Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
  - ✓ Pengadaan IPAL
  - ✓ Bimtek e-Monev Higiene Sanitasi Pangan (HSP)
  - ✓ Sosialisasi Kab/Kota Sehat (KKS)
  - ✓ Pembangunan Rumah Marasa

#### **15. Program Jaminan kesehatan**

- ✓ Diseminasi Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan TK Provinsi
- ✓ Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di FKTP
- ✓ Pengawasan & Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan JKN Tingkat Lanjut
- ✓ Konsultasi Teknis Pelaksanaan Program Pembiayaan & Jaminan Kesehatan
- ✓ Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
- ✓ Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan TK Provinsi
- ✓ Pemenuhan Bantuan Iuran Bagi Peserta Penerima Iuran (PBI) Daerah
- ✓ Penguatan Tenaga Coder dalam INA-CGBs

#### **16. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- ✓ Pengadaan promkes kit
- ✓ Penyebarluasan Informasi kesehatan melalui berbagai media di Provinsi
- ✓ Pencetakan media pendukung advokasi
- ✓ Promosi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dalam Rangka Mewujudkan Sulbar Marasa
- ✓ Talkshow Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- ✓ Koordinasi penguatan implementasi kebijakan lintas sektor terkait Germas di Kab/Kota
- ✓ Penyebaran Informasi Rumah Tangga ber PHBS
- ✓ Pembinaan Saka Bakti Husadah
- ✓ Orientasi Rumah Marasa
- ✓ Penggerakan Masyarakat Perilaku Sehat dalam Germas
- ✓ Pembinaan Desa Siaga Aktif Tingkat Provinsi
- ✓ Pertemuan Koordinasi Pokjandal Desa/Kelurahan Siaga Aktif
- ✓ Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan

- 
- ✓ Evaluasi dan Intervensi GERMAS
  - ✓ Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada
  - ✓ Penyusunan Perda Bidang Kesehatan
  - ✓ Bimbingan Teknis Perencanaan Promkes di Kabupaten
  - ✓ Fasilitasi Program Marasa
  - ✓ Evaluasi pelaksanaan Kampanye Germas di Daerah
  - ✓ Bimbingan Teknis Perencanaan Promkes di Kabupaten
  - ✓ Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi kader, Bidan/Perawat Desa dan Petugas Puskesmas

#### **17. Program Kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan**

- ✓ Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara
- ✓ Pertemuan Evaluasi dan Pelaporan TK.Provinsi
- ✓ Lokakarya Penyamaan Persepsi Tentang Sistem Kesehatan;
- ✓ Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- ✓ Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Sulawesi Barat
- ✓ Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan
- ✓ Pembinaan wilayah lokakarya mini lintas sektor
- ✓ Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program
- ✓ Bimbingan Teknis Penyusunan Pertanggung Jawaban Belanja
- ✓ Kalakarya Kesehatan
- ✓ Penyusunan dan Sosialisasi Renstra Kesehatan
- ✓ Diklat Perbendaharaan
- ✓ Monev Laporan Keuangan dan Aset Negara
- ✓ Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Sulawesi Barat Penurunan AKI - AKB dan Sanitasi
- ✓ Assessment dan analisis masalah kesehatan
- ✓ Penyusunan Perencanaan Kesehatan berbasis SPM Kesehatan
- ✓ Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Keuangan
- ✓ Rapat Kerja Kesehatan Daerah
- ✓ Monitoring dan Evaluasi DAK Kesehatan
- ✓ Penyusunan Dokumen Public health Account dan District Health Account
- ✓ Penyusunan Perda Bidang Kesehatan
- ✓ Bimbingan Teknis Perencanaan di Kabupaten
- ✓ Fasilitasi dan Intevensi Program Marasa Bidang Kesehatan
- ✓ Pemetaan Assessment dan analisis Prioritas masalah kesehatan Desa
- ✓ Pembentukan Fasilitator Pendamping Desa Marasa
- ✓ Rapat Koordinasi Lintas Program dan Sektor Terkait
- ✓ Pertemuan Koordinasi Teknis Desa MARASA
- ✓ Workshop Kader Pendamping Desa Marasa


- ✓ Penyusunan Rodmap dan Petunjuk Teknis Desa MARASA Bidang Kesehatan
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Program MARASA

#### **18. Program pengembangan Sistem Informasi kesehatan**

- ✓ Pelatihan Penyusunan Profil Kesehatan
- ✓ Desiminasi informasi profil kesehatan
- ✓ Pelatihan Aplikasi Pendampingan Ibu Hamil
- ✓ Monev dan Bimbingan Teknis Data Program keluarga Sehat
- ✓ Pengadaan komputer untuk SIKNAS/SIKDA
- ✓ Pelatihan Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
- ✓ Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
- ✓ Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi (SMS Gate way)
- ✓ Riset Indikator RPJMD, SDGs dan Renstra Bidang Kesehatan
- ✓ Pelatihan SIKDA GENERIK
- ✓ Pelatihan Analisa Data Kesehatan
- ✓ Monitoring Dan Evaluasi Data Kesehatan
- ✓ Rapat Lintas Sektor Analisa Data Kesehatan
- ✓ Pelatihan PKMDR

#### **19. Program pelayanan Kesehatan perorangan**

- ✓ Peningkatan pelayanan kesehatan di Poli
- ✓ Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Dokter dan Paramedis
- ✓ Penyuluhan dan Updating Pendataan Kepesertaan BPJS
- ✓ pengadaan Peralatan Kesehatan
- ✓ Administrasi perkantoran / penyediaan sarana dan prasarana di Poli
- ✓ Pengadaan Obat - Obatan dan Bahan Habis Pakai
- ✓ Skrining Kesehatan lingkup ASN Pemprov Sulawesi Barat
- ✓ Kalibrasi Peralatan Kesehatan
- ✓ Kegiatan Donor Darah
- ✓ Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan
- ✓ Pendataan pendonor darah secara berkala
- ✓ Workshop Donor Darah
- ✓ Pengadaan Peralatan Donor Darah
- ✓ Penyusunan Tarif Pelayanan Laboratorium
- ✓ Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
- ✓ Pelatihan Teknis Tenaga Kesehatan tentang pelayanan Laboratorium
- ✓ Pengadaan Peralatan Laboratorium
- ✓ Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagent
- ✓ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang
- ✓ Kalibrasi Peralatan Kesehatan
- ✓ Promosi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

- 
- ✓ Akreditasi mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi
  - ✓ Pemeriksaan pemantapan mutu hasil dari Laboratorium yang ada di Kabupaten
  - ✓ Pengadaan Mobil Keliling Laboratorium
  - ✓ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang
  - ✓ Penyediaan Biaya Administrasi, Operasional dan Pemeliharaan Labkes dan Transfusi Darah
  - ✓ Pertemuan Pemantapan Mutu Laboratorium
  - ✓ Promosi Kegiatan Pelayanan Balai Labkes dan Transfusi Darah
  - ✓ Akreditasi mutu Pelayanan Balai Labkes Dan Transfusi Darah
  - ✓ Pemeriksaan Kualitas Air Minum
  - ✓ Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Laboratorium
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah
  - ✓ Operasional Mobil Keliling Laboratorium



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja bidang kesehatan dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. Rencana Kerja merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem nasional lainnya dalam suatu supra sistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan. Oleh karena itu tidak tertutup terhadap penyesuaian dan penyempurnaan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat bergantung pada semangat, dedikasi, ketekunan, kerja keras, kemampuan dan ketulusan para penyelenggara, serta sangat bergantung pula pada petunjuk, rahmat, dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.